
Upaya Seafood Savers Dalam Meningkatkan Ekspor Udang Indonesia ke Uni Eropa 2014 – 2018

Rio Rizki Ananda
International Relation Department
Faculty of Social and Political
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Riatorres80@gmail.com
Submitted: 13 January 2020 ;accepted:

Abstrak

Skripsi ini menganalisis tentang upaya *seafood savers* dalam meningkatkan ekspor udang Indonesia ke uni eropa 2014-2018. Penelitian ini mencoba untuk menguraikan upaya apa saja yang dilakukan oleh *seafood savers* dalam meningkatkan ekspor udang ke uni eropa serta terus mengkampanyekan perikanan yang bertanggung jawab dan ramah lingkungan. Peneliti menggunakan model advokasi dan konsep non governmental organization (NGO) untuk menjelaskan bagaimana cara *seafood savers* melakukan upayanya dalam membantu pelaku industri udang agar produk mereka dapat dipasarkan serta diterima masyarakat internasional di pasar internasional.

Kata kunci: seafood savers, Indonesia, uni eropa, pasar internasional, ekspor

Abstract

This thesis analyzes efforts to save seafood to increase exports of Indonesian shrimp to the European Union 2014-2018. This research attempts to describe the efforts from seafood savers to increase shrimp exports to the European Union and continue to campaign for responsible and environmentally friendly fisheries. Researchers use advocacy model and the concept of non-governmental organizations (NGOs) to explain how seafood savers efforts in helping shrimp industry to make their products can be marketed and accepted in international markets.

Keywords: seafood savers, Indonesia, European Union, international markets, export.

PENDAHULUAN

Seafood Savers merupakan inisiatif World Wildlife Fund (WWF) - Indonesia untuk menjembatani para pelaku industri dalam mewujudkan perikanan Indonesia yang berkelanjutan. Sejak 2009, Seafood Savers bekerja sama dengan para pemangku kepentingan dalam memberi apresiasi kepada para pelaku industri yang telah berkomitmen pada perikanan Indonesia yang lebih baik (Seafood Savers, 2019). Dalam hal ini, pemerintah Indonesia dan juga Sea Food Savers selalu berusaha meningkatkan kualitas penangkapan maupun budi daya udang secara berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan dan habitat nya. Seafood Savers mengacu pada dua sertifikasi perikanan berkelanjutan dan bertanggung jawab, yaitu Marine

Stewardship Council (MSC) untuk perikanan tangkap dan Aquaculture Stewardship Council (ASC) untuk perikanan budi daya (Seafood Savers, 2017). Dengan adanya seafood savers diharapkan bisa menjembatani ekspor udang Indonesia ke Uni Eropa dengan lancar.

Sektor Perikanan merupakan salah satu sektor non migas yang turut berperan serta dalam memberikan kontribusi devisa bagi negara melalui ekspor produk-produk perikanan. Beberapa komoditas dengan perolehan devisa yang cukup tinggi berasal dari sektor perikanan. Produk tangkapan maupun budidaya yang menjadi komoditas utama ekspor antara lain produk udang, tuna, kepiting, dan cumi. Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki luas perairan yang lebih besar dari luas daratannya menjadi salah satu produsen hasil laut terbesar di dunia (Lubis, 2012).

Dengan kondisi alam yang strategis, hal ini menjadi keuntungan bagi masyarakat Indonesia untuk menangkap dan membudidayakan sektor perikanan di seluruh bagian tanah air Indonesia. Selain itu, sektor perikanan juga dapat menyediakan lapangan pekerjaan dan sumber devisa serta investasi bagi Indonesia. Salah satu komoditas dari subsektor perikanan yang memiliki nilai jual yang tinggi adalah Udang.

Berdasarkan data produksi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dalam 5 tahun terakhir dari 2013 -2017 tercatat volume produksi tumbuh rata-rata 6,43 persen. Sedangkan nilai ekspor naik dari USD 1,42 milyar menjadi USD 1,80 milyar. Ini menunjukkan komoditas udang memiliki pertumbuhan yang positif di subsektor perikanan. Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2018 sudah menargetkan produksi udang mencapai 700.000 ton (Kontan, 2018).

Hal ini disebabkan meningkatnya permintaan Produk udang di pasar Internasional setiap tahunnya. Menurut Asosiasi Pengusaha Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia (AP51) Uni Eropa menjadi pasar yang menjanjikan dan potensial untuk meningkatkan ekspor udang Indonesia khususnya Negara-negara Eropa Barat seperti Perancis dan Belanda (Ekarina, 2019). Namun untuk bisa masuk ke pasar Uni Eropa, produk-produk yang ingin di ekspor harus memenuhi persyaratan yang cukup ketat.

Negara yang ingin mengekspor barang ke Uni Eropa harus datang dari negara yang diberi otoritas, yaitu harus terdaftar dalam negara yang bisa mengekspor produk perikanan ke Uni Eropa. Daftar ini didasarkan pada penilaian oleh *European Union Food and Veterinary Office* agar sesuai dengan standar kesehatan Eropa untuk produk

perikanan. Udang hanya bisa diimpor ke Uni Eropa jika telah dikirim dari, diperoleh atau disiapkan di tempat yang telah disetujui (cold store, pabrik pengolahan, pabrik atau kapal freezer), sehingga fasilitas ini harus diperiksa dan disetujui oleh pemerintah Indonesia (Kementerian Pertanian, Kesehatan, dan Perdagangan). Dan terakhir, Udang membutuhkan sertifikat kesehatan yang mengkonfirmasi bahwa udang tersebut memenuhi standar ekspor ke Uni Eropa. Sertifikat ini disampaikan oleh pemerintah Indonesia dengan menggunakan template yang telah diharmonisasi (Kemendag, 2019).

Dalam konteks ini, perlu upaya yang lebih maksimal meningkatkan kinerja tersebut yang harapannya dapat berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun tekanan terhadap sumber daya perikanan dunia juga semakin meningkat. Laporan FAO 2010 menyebutkan 53 persen sumber daya ikan telah dimanfaatkan secara maksimal (fully exploited), 28 persen dimanfaatkan berlebih (overexploited), 3 persen habis (depleted) dan sebanyak 1 persen dalam pemulihan (Seafood Savers, 2017). Baik perikanan tangkap maupun budi daya telah menyumbang pada eksploitasi sumber daya perikanan ini. Uni Eropa saat ini menjadi kawasan yang memiliki isu sensitif terhadap isu lingkungan dimana banyak barang-barang ekspor yang sulit masuk ke Uni Eropa seperti Coconut Palm Oil (CPO).

Tercipta tren saat ini dimana kalangan masyarakat Negara Uni Eropa, mereka tidak akan menerima, menggunakan atau memakan sesuatu yang menyebabkan rusaknya lingkungan. Di samping itu permintaan impor udang meningkat setiap tahunnya di negara-negara seperti Spanyol, Perancis, Jerman dan Italia. Maka dari itu dalam mewujudkan industri perikanan yang berkelanjutan diperlukan peran dari berbagai pihak untuk melengkapi satu sama lain. Pemerintah dibutuhkan sebagai pencetus dan penyusun regulasi, Ilmuan dan peneliti dibutuhkan untuk terus merumuskan penemuan-penemuan yang dapat menemukan serangkaian inovasi agar terciptanya perikanan yang berkelanjutan, bisnis diperlukan untuk menjalankan regulasi yang sudah di susun oleh pemerintah, dan nelayan adalah mereka yang telah bernafas senada dengan laut.

KERANGKA BERPIKIR

1. Model Advokasi

Advokasi merupakan salah satu dari proses demokrasi yang dapat dilakukan oleh warga negara untuk mengawasi dan melindungi kepentingan mereka dalam kaitannya dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Advokasi juga sebagai langkah untuk

merekomendasikan gagasan kepada orang lain atau menyampaikan suatu isu penting untuk dapat diperhatikan masyarakat serta mengarahkan perhatian parapembuat kebijakan untuk mencari penyelesaiannya serta membangun dukungan terhadap permasalahan yang diperkenalkan dan mengusulkan bagaimana cara penyelesaian masalah tersebut. Satu kerangka analisis yang dapat digunakan untuk memahaminya ialah dengan melihat kebijakan tersebut sebagai sistem hukum yang terdiri dari:

- a. Isi Hukum (*content of law*)
- b. Tata laksana hukum (*structure of law*)
- c. Budaya hukum (*culture of law*)

Tiga aspek tersebut saling bertautan satu sama lain secara sistematis sehingga kegiatan advokasi yang dilakukan harus dapat mempengaruhi ketiga aspek tersebut. Jika advokasi dimaknai sebagai upaya untuk memperbaiki atau merubah kebijakan pemerintah agar sesuai dengan kepentingan sebuah organisasi atau kelompok yang mendesakkan terjadinya perubahan.

Kegiatan advokasi bergerak pada semua jenis dan proses pembentukan kebijakan publik yang jadi sasarannya sehingga kegiatan advokasi memerlukan keterlibatan banyak pihak dengan spesifikasi keahlian yang berbeda-beda tetapi terorganisir secara sistematis. Kegiatan advokasi, baik ditingkat lokal, nasional maupun Internasional melibatkan berbagai pihak/organisasi yang dapat digambarkan dalam segitiga koordinasi sebagai berikut:



Tampak dalam bagan diatas yaitu Model Advokasi Segitiga Koordinasi, bahwa kegiatan advokasi memerlukan banyak pihak untuk menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Langkah-langkah advokasi yang dilakukan oleh NGO di Indonesia tidak luput dari keterlibatan banyak pihak yang teroganisir secara sistematis dan saling berhubungan seperti yang digambarkan oleh Model Advokasi Segitiga Koordinasi di atas. Pihak tersebut bekerja dalam memobilisasi masa, pihak yang menyediakan data, pihak yang menyediakan dana, pihak yang menjalankan fungsi legislative dan pihak yang berperan sebagai juru bicara dan lobi yang akan membentuk suatu jaringan advokasi. Keterlibatan aktor-aktor ini penting dalam mewujudkan kebijakan publik yang diharapkan oleh NGO yang melakukan advokasi-advokasi terhadap pemerintah (Azizah, 2013).

Dalam hal ini satu tahun setelah dibentuknya Seafood Savers pada 2009, World Wildlife Fund (WWF) selaku induk dari Seafood Savers melakukan kerjasama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk perikanan yang berkelanjutan. Seafood Savers juga melakukan beberapa advokasi terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh KKP karena dianggap menyulitkan salah satu anggotanya dalam melakukan kegiatan perikanan.

2. Konsep Non Governmental Organization (NGO)

NGO dewasa ini perkembangannya menjadi sangat signifikan terutama dalam kurun waktu tiga dekade terakhir. NGO telah berkembang dalam hal jumlah, ukuran, maupun keberagaman isu yang menjadi perhatiannya, terutama isu-isu yang berbau lingkungan dan sosial.

NGO didefinisikan sebagai organisasi independent, non-partisan, non-profit yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dari mereka yang termajinalkan. (Tujil, 1999)

Margaret Karns mendefinisikan Non Governmental Organization (NGO) sebagai kelompok individu atau organisasi sukarela, biasanya tidak berafiliasi dengan pemerintah mana pun, yang dibentuk untuk menyediakan layanan atau untuk mengadvokasi kebijakan publik. Isu yang ditangani oleh NGO menjalankan keseluruhan masalah manusia misalnya, hak asasi manusia, lingkungan, penanganan bencana, bantuan pembangunan dan ruang lingkup kegiatan mereka dapat bersifat lokal, nasional, atau internasional. NGO dapat dibiayai oleh sumbangan pribadi, organisasi internasional, pemerintah, atau kombinasi dari keduanya. (Karns, 2019)

Sementara itu Teegen mendefinisikan NGO sebagai organisasi non-profit yang bertujuan untuk melayani permintaan masyarakat yang spesifik dengan memfokuskan kepada upaya advokasi atau operasional kepada tujuan sosial, politik dan ekonomi, termasuk persamaan pendidikan, kesehatan, perlindungan lingkungan dan HAM (Teegen, 2004).

Dalam sebuah dokumen kerjasama antara World Bank dan NGO, World bank menjelaskan bahwasanya NGO di bagi dalam dua kelompok , yaitu :

NGO Operasional yang bertujuan untuk perancangan dan implementasi pengembangan. Kelompok ini menggerakkan sumber daya dalam bentuk keuangan, material atau tenaga relawan guna menjalankan proyek atau program mereka. Proses ini umumnya membutuhkan organisasi yang kompleks. NGO operasional bisa di uraikan menjadi 3 kelompok, yaitu :

- a. Organisasi berbasis masyarakat yang melayani masyarakat khusus dalam suatu daerah geografis yang sempit.
- b. Organisasi Nasional – yang beroperasi dalam sebuah Negara yang sedang berkembang.
- c. Organisasi Internasional – yang pada dasarnya berkantor pusat di Negara – Negara maju dan menjalankan operasi di lebih dari satu Negara yang sedang berkembang.

Kedua NGO Advokasi yang bertujuan untuk mempertahankan atau memelihara suatu isu khusus dan bekerja untuk mempengaruhi kebijakan dan tindakan pemerintah atas isu tersebut. Berlawanan dengan manajemen proyek operasional, organisasi ini pada dasarnya berusaha untuk meningkatkan kesadaran (awareness) dan pengetahuan dengan melakukan lobi, kegiatan pers dan kegiatan aktivis. NGO ini pada dasarnya bekerja melalui advokasi atau kampanye atas suatu isu dan tidak mengimplementasikan program. Kelompok ini menjalankan fungsi yang hampir sama dengan kelompok operasional, namun dengan tingkatan dan komposisi yang berbeda (Malena, 1995).

Dalam hal ini Seafood Savers sebagai inisiatif dari WWF Indonesia dapat digolongkan sebagai NGO Operasional maupun NGO Advokasi. Sebab dalam program yang dijalankan Seafood Savers sendiri mengedepankan kedua prinsip yang di implementasikan kedua jenis NGO tersebut. Seafood Savers merupakan organisasi yang berbasis masyarakat yang melayani masyarakat khusus dalam suatu daerah geografis yang sempit dan organisasi yang beroperasi dalam sebuah Negara yang sedang berkembang. Seafood Savers juga berusaha meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya isu lingkungan, terutama dalam pentingnya menjaga perikanan Indonesia yang berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan metode analisa kualitatif dalam penelitian ini. Dalam menganalisis permasalahan berdasarkan fakta-fakta yang ada dengan menghubungkan fakta tersebut dengan fakta yang lainnya sehingga menghasilkan argumen yang tepat. teknik

pengumpulan data penulis menggunakan teknik studi kepustakaan yaitu, penelusuran data-data yang bersumber dari bahan-bahan tertulis yang berasal dari buku, beberapa dokumen, media masa, internet serta sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

PEMBAHASAN

Advokasi Seafood Savers

Fungsi Seafood Savers sebagai sebuah Non Governmental Organization (NGO) mempengaruhi kebijakan pemerintah agar membuat regulasi yang memenuhi standarisasi perikanan yang berkelanjutan serta memperlancar para anggotanya dalam menjalankan segala kegiatan perikanan yang baik, terwujud dalam bentuk kerjasama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

1. Advokasi Seafood Savers terhadap perikanan Indonesia

Dalam upayanya mengadvokasi sebuah kebijakan, Seafood Savers terus mendukung industri perikanan yang bertanggungjawab dan tentunya berkelanjutan. Salah satu upaya advokasi yang dilakukan Seafood Savers terhadap regulasi-regulasi tersebut terwujud dalam Perdirjen No. 17 Tahun 2017 tentang petunjuk teknis penyusunan dokumen strategi, SK Dirjen No. 47 Tahun 2017 tentang perikanan tangkap, SK Dirjen No. 18 Tahun 2014 tentang *ecosystem approach to fisheries* management dan membantu membuat *seafood guide* yang berupa cetakan kertas berisi panduan bagi konsumen untuk memilih produk perikanan yang ramah lingkungan dan juga untuk memudahkan konsumen mengetahui produk perikanan yang mengalami tekanan konsumsi sehingga sebaiknya dihindari untuk di konsumsi. Seafood Savers juga membuat *seafood advisor* yang sudah bisa masyarakat download di Play Store untuk pengguna android yang sudah diterbitkan dari 2005 dan terus diperbaharui sampai sekarang.

Salah satu upaya kegiatan advokasi yang dilakukan Seafood Savers yaitu pada tahun 2016, dampak dari adanya Permen Kelautan Perikanan No 15 Tahun 2016 tentang Kapal Pengangkut Ikan yang masih ambigu dan spesifik membuat salah satu perusahaan anggota Seafood Savers, UD Pulau Mas yang merupakan rantai suplai usaha dagang kecil perorangan mengalami masalah dalam menjalankan usahanya untuk melakukan penangkapan ikan karenaisu mengenai definisi bidang usaha yang dijalankan termasuk dikategorikanbudidaya atau tangkap sehingga berdampak pada izin kapal angkut yang tidak dapat beroperasi(Seafood Savers, 2016).

WWF-Indonesia selaku induk dari Seafood Savers bersama direktur utama UD. Pulau Mas, Heru Purnomo, melakukan kegiatan advokasi kepada pemerintah untuk memperjelas definisi tentang perikanan tangkap dan budidaya pada saat agenda Seafood Savers Annual Meeting. Melalui proses advokasi tersebut, Pemerintah akhirnya menerbitkan Permen KP No 32 tahun 2016 untuk merevisi Permen KP no 15 tahun 2016 tentang Kapal Pengangkut Ikan. Melalui Permen tersebut, ijin kapal pengangkut ikan UD Pulau Mas kembali bisa diterbitkan dan perusahaan bisa beraktifitas seperti biasanya(KKP, 2016).

2. Seafood Savers Sebagai Penghubung

Dalam upayanya sebagai penghubung, Seafood Savers memfasilitasi pengadaan produk perikanan yang ramah lingkungan melalui hubungan bisnis yang terjalin antara produsen, ritel, dan institusi keuangan yang menjadi anggota Seafood Savers. Seafood Savers menjadi penghubung atau sebagai wadah dalam rangka peningkatan program kerja dan perbaikan perikanan di Indonesia dengan rutin menggelar workshop, festival, dan dialog yang melibatkan bermacam *stakeholder* seperti perusahaan, ritel, nelayan maupun konsumen.

Seafood Savers mengadakan agenda tahunan mereka yang bernama *Seafood Savers Annual Meeting* yang bertujuan untuk mewadahi atau memfasilitasi para anggota perusahaan dengan stakeholders terkait atau lembaga perikanan guna membahas rancangan rencana kerja program perbaikan perikanan di Indonesia. Pada *Seafood Savers Annual Meeting* diadakan pada 2018 lalu tepatnya pada bulan Mei bertempat di hotel Aston Kuta, Badung Bali. Agenda meeting tahunan ini membahas evaluasi laporan hasil implementasi program kerja yang telah berjalan dan merumuskan program-program untuk tahun berikutnya. Dalam kegiatan tersebut, PT Mustika Minanusa Aurora dan PT Bumi Menara Internusa yang merupakan anggota Seafood Savers yang sudah mendapat sertifikasi ecolabel ASC turut hadir di acara tersebut. Selain itu, kegiatan ini juga dihadiri perwakilan dari Direktorat Promosi, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.



Gambar 1.1 Seafood Savers Annual Meeting 2018

Kegiatan *Annual Meeting* ini bertujuan untuk memonitoring setiap program-program yang sudah dijalankan dalam setahun terakhir dan juga untuk mendekatkan hubungan bisnis yang terjalin antara produsen, ritel, dan institusi keuangan yang menjadi anggota Seafood Savers. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini, semua kalangan yang tergabung terus berkomitmen dalam menjaga perikanan Indonesia dan bersungguh-sungguh untuk menjalankan program perbaikan perikanan berkelanjutan.

Kegiatan ini menciptakan terbentuknya ruang diskusi untuk membahas permasalahan dan kendala serta peluang dan tantangan perbaikan perikanan di Indonesia antara pelaku industri perikanan dan pemerintah. Dengan diselenggarakannya kegiatan *Seafood Savers Annual Meeting* ini, diharapkan dapat menghasilkan rumusan kerja strategis terhadap perbaikan perikanan di Indonesia bagi internal Seafood Savers dan pemerintah.

Seafood Savers sebagai Non Governmental Organization (NGO)

Seafood Savers sebagai Non Governmental Organization (NGO) melakukan upaya untuk meningkatkan ekspor udang Indonesia dengan cara pembinaan kepada pelaku industri perikanan, terutama dalam komoditas udang.

1. Asistensi Teknis Seafood Savers Kepada Pemangku Usaha

Pada upaya asistensi, Seafood Savers melakukan bantuan seperti pendampingan secara teknis kepada perusahaan anggota untuk mendapatkan sertifikasi MSC dan ASC melalui kegiatan perbaikan perikanan tangkap maupun budidaya. Seiring berjalannya waktu, para konsumen terutama masyarakat Uni Eropa sangat selektif dalam memilih produk-produk yang mereka gunakan. Inilah mengapa pentingnya perusahaan-perusahaan industri perikanan menerapkan prinsip perikanan yang berkelanjutan. Ketika para pelaku industri sudah

memiliki kedua sertifikasi tersebut, produk yang mereka jual akan mudah masuk ke pasar Uni Eropa dan dalam hal ini tentu akan meningkatkan ekspor terutama komoditas udang.

Dalam upayanya, pada 2018 pihak dari Seafood Savers bersama dengan PT Sekar Laut Tbk yang merupakan salah satu perusahaan anggota Seafood Savers, berkunjung ke Kabupaten Kotabaru untuk mengetahui secara langsung asal usul udang yang mereka beli dari nelayan Kotabaru. Kunjungan ini dipimpin langsung oleh Welliam Cung, General Manager dari PT Sekar Laut Tbk langsung menyambangi lokasi nelayan penangkap udang putih (*Fenneropenaeus merguensis*, *banana shrimp/prawn*) yang tergabung dalam KUB. Usaha Bersama dan di Desa Sungai Pasir, Kecamatan Pulau Laut Tengah dan KUB. Tunas Harapan di Desa Senakin, Kecamatan Kelumpang Tengah. Ini dikarenakan seiring perkembangan isu soal lingkungan, konsumen di Eropa mulai kritis terkait apa yang mereka konsumsi. Muncul banyak pertanyaan dari konsumen terkait asal usul makanan yang mereka konsumsi. Hal ini membuat Intersnack Procurement dan Unilever sebagai pembeli kerupuk udang dari PT Sekar Laut Tbk yang berlokasi di Belanda harus bisa menyajikan informasi ketelusuran produknya kepada konsumen.

Selain itu Seafood Savers juga melakukan diskusi dengan pemerintah Kabupaten Kotabaru terkait perancangan Rencana Zonasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), untuk lokasi tangkap nelayan dilakukan sesuai zonasi agar tempat ikan-ikan termasuk udang berkembang biak tidak diganggu. Seafood Savers juga menawarkan program *Fisheries Improvement Program* (FIP) untuk produksi udang Kotabaru yang lebih ramah lingkungan.



Gambar 1.2 Diskusi terkait program FIP bersama Sekda dan Kadis DKP Kotabaru

Dalam program FIP tersebut, dilakukan pencatatan *logbook* hasil tangkapan dan kendala apa saja yang terjadi dilapangan. Tantangan yang mungkin dihadapi oleh Seafood Savers, PT Sekar Laut Tbk maupun Pemerintah Kabupaten Kotabaru adalah masih adanya beberapa kelompok nelayan yang menggunakan *trawl* yang mana sekarang sudah termasuk

alat tangkap yang kurang selektif dan tidak ramah lingkungan. Disamping itu permintaan produk kerupuk udang juga semakin tinggi, program FIP ini mengajak agar para kelompok nelayan yang lain juga menggunakan cara tangkap yang ramah lingkungan agar produk udang mereka bisa masuk dipasar Internasional.

Diharapannya kedepannya, bahan baku produk kerupuk udang dari PT Sekar Laut Tbk sepenuhnya berasal dari nelayan yang menggunakan cara tangkap yang bertanggung jawab. Sehingga nantinya, siap menuju sertifikasi ekolabel *Marine Stewardship Council* (MSC) sebagai bukti bahwa kerupuk udang dari Kabupaten Kotabaru adalah produk yang ramah lingkungan. Hal ini juga tentunya akan mengangkat nama Kotabaru di pasar Internasional lewat produk kerupuk udang mereka. Unilever berencana menuliskan nama daerah Kabupaten Kotabaru dalam setiap kemasan produk kerupuk udang mereka. Dan nantinya juga akan membuat perusahaan-perusahaan lain yang bergerak dalam pengolahan produk perikanan masuk ke Kabupaten Kotabaru untuk membeli udang hasil tangkapan nelayan yang terkenal ramah lingkungan.

Upaya asistensi dari Seafood Savers ini jelas bertujuan untuk membantu memperbaiki kualitas lingkungan dan hasil produksi udang nelayan-nelayan Kabupaten Kotabaru serta memberi jalan kepada para pelaku usaha agar produk yang mereka jual tidak lagi diragukan di pasar Internasional. Hal ini tentu dapat mengangkat daya saing produk perikanan Indonesia di pasar Internasional dan meningkatkan nilai ekspor udang Indonesia ke negara-negara Uni Eropa. Dalam hal ini Seafood Savers dapat digolongkan dalam sebagai NGO Operasional. Dimana Seafood Savers bertujuan untuk perancangan dan implementasi pengembangan dan berbasis masyarakat yang melayani masyarakat khusus dalam suatu daerah geografis yang sempit.

2. Kampanye Seafood Savers Untuk Perikanan yang Berkelanjutan

Pada upaya ini Seafood Savers melakukan edukasi kepada konsumen mengenai pentingnya memilih dengan baik produk-produk perikanan yang bertanggungjawab. Cara yang digunakan oleh Seafood Savers untuk melakukan upaya edukasi ini dengan melakukan kampanye-kampanye secara langsung maupun tidak langsung, contoh secara langsung Seafood Savers mengadakan festival, workshop atau dialog mengenai pentingnya perikanan yang berkelanjutan, sedangkan secara tidak langsung kampanye dilakukan melalui media sosial seperti Instagram dimana cara ini sangat efektif agar informasi juga dapat diterima oleh kaula muda.

Acara festival seperti *Not an Ordinary Fish Market* yang dilakukan di sekitaran pantai Kuta Bali pada 2015 lalu, menjadi salah satu upaya dari Seafood Savers untuk mempromosikan produk-produk perikanan yang ramah lingkungan. Festival ini jelas ditujukan kepada wisatawan asing yang sedang berlibur ke pulau Bali. Hal ini selain menyadarkan masyarakat domestik terhadap pentingnya memilih produk perikanan yang ramah lingkungan, juga menunjukkan kepada masyarakat Internasional bahwa Indonesia sekarang juga sudah ikut memperhatikan pentingnya isu lingkungan dalam perikanan yang berkelanjutan. Dalam acara yang bertemakan *sustainable seafood* tersebut, Seafood Savers berkesempatan untuk menjelaskan usaha-usaha yang dilakukan Seafood Savers dan para anggotanya untuk mewujudkan perikanan yang berkelanjutan di Indonesia.



Gambar 1.4 Festival *Not an Ordinary Fish Market*

Selain kampanye secara langsung, kampanye Seafood Savers juga dilakukan secara tidak langsung melalui website dan akun media sosial yang dimiliki oleh Seafood Savers yang berupa facebook, twitter dan instagram. Melalui akun-akun media sosialnya tersebut Seafood Savers berkampanye menyuarakan praktik perikanan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Postingan atau unggahan yang dilakukan akun media sosial mereka biasanya lebih ditujukan kepada konsumen atau pembeli produk perikanan. Dalam hal ini Seafood Savers mengajak masyarakat untuk selalu peduli dalam menjaga keadaan perikanan di Indonesia. Tidak hanya tertuju pada hubungan *bussines to bussines*, Seafood Savers juga berusaha untuk mendukung perbaikan perikanan di Indonesia dengan menjalin hubungan dengan konsumen atau pembeli. Agar terus menimbulkan kesadaran dimasyarakat akan pentingnya perikanan yang berkelanjutan.

Beberapa akun Seafood Savers di media sosial seperti facebook, twitter, dan instagram sering mengunggah kampanye yang berisikan agar setiap pembeli dapat membeli produk

perikanan yang baik. Kampanye ini jelas bertujuan agar konsumen lebih selektif dalam memilih produk perikanan yang baik dengan cara memberikan informasi produk apa saja dan mana saja yang sudah lulus sertifikasi ekolabel. Sertifikasi tersebut menunjukkan bahwa produk perikanan yang dibeli merupakan produk yang ramah lingkungan dan proses penangkapannya dilakukan dengan bertanggung jawab.

Kampanye maupun edukasi ini jelas bertujuan untuk mempromosikan produk-produk perikanan Indonesia di pasar Internasional dan memberi informasi kepada masyarakat bahwa produk perikanan Indonesia sudah layak dipasarkan di pasar Internasional. Dimana jika sudah adanya kepercayaan terhadap produk perikanan Indonesia, pasar Internasional tidak akan ragu lagi dalam menggunakan maupun mengekspor produk dari Indonesia. Sehingga hal ini dapat meningkatkan ekspor terutama produk udang Indonesia khususnya ke Uni Eropa.

Kendala tentu selalu ada dari program ini, karena tidak semua masyarakat dapat teredukasi yang berdampak terhadap antusias atau ketertarikan masyarakat selaku konsumen belum begitu sadar akan pentingnya hal tersebut. Karena sebenarnya konsumen berperan penting untuk meminta perusahaan menyediakan produk-produk ekolabel dan ramah lingkungan sehingga akan membantu menurunkan tindakan *IUU Fishing (Illegal, unreported and unregulated)*, dan terus menekan turun keberadaan perusahaan yang menjalankan bisnisnya dengan tidak baik.

Dalam hal ini Seafood Savers menunjukkan peran mereka sebagai NGO menurut Teegen. Dimana Seafood savers bertujuan untuk melayani permintaan masyarakat yang spesifik dengan memfokuskan kepada upaya advokasi atau operasional kepada tujuan sosial, politik dan ekonomi, termasuk persamaan pendidikan, kesehatan, perlindungan lingkungan dan HAM (Teegen, 2004).

Dalam 5 tahun terakhir 2014-2019, neraca perdagangan perikanan Indonesia menjadi yang terbaik di Asia Tenggara. Dimana setiap tahunnya ekspor perikanan Indonesia naik 12% setiap tahunnya (Fauzi, 2005). Salah satu komoditas yang sangat potensial adalah Udang. Ekspor udang menjadi pilar utama dalam subsektor perikanan Indonesia. Dalam jangka waktu Januari-Oktober 2018 nilai ekspor udang telah mencapai USD 1,5 Milliar. Dan menjadi negara nomor 4 terbesar di dunia dalam ekspor udang beku.

Hal ini tidak lepas dari beberapa usaha dari berbagai pihak dalam meningkatkan ekspor udang Indonesia. Khususnya untuk mengekspor udang ke negara-negara Uni Eropa. Dengan beberapa upaya yang dilakukan Seafood Savers dalam membantu para anggota mereka untuk mendapatkan sertifikasi ekolabel. Dimana dalam 10 tahun berdirinya Seafood Savers, sudah banyak anggota mereka yang mendapatkan sertifikasi ekolabel. Sehingga proses ekspor

produk udang yang dilakukan para pelaku industri maupun produk hasil dari nelayan dapat diterima di pasar Uni Eropa.

Dampak dari upaya yang dilakukan Seafood Savers dapat dilihat dari meningkatnya nilai ekspor udang Indonesia ke Uni Eropa. Serta mulainya muncul kesadaran di masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan dan terus menggunakan produk perikanan yang ramah lingkungan.

KESIMPULAN

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan luas pantai lebih besar dari luas daratannya. Hal ini membuat Indonesia memiliki potensi yang sangat besar di sektor perikananannya. Selain untuk membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakatnya, sektor perikanan tentunya juga dapat membantu meningkatkan devisa negara dengan mengekspor produk-produk perikananannya. Salah satu produk yang menjadi primadona di sektor perikanan Indonesia adalah udang.

Namun potensi ini juga mengakibatkan terjadinya *overfishing* atau pemanfaatan perikanan yang berlebihan. Tentu hal ini tidak sesuai dengan konsep perikanan yang berkelanjutan. Eksploitasi tersebut tidak hanya terjadi pada perikanan tangkap, eksploitasi ini juga bisa terjadi pada perikanan budidaya. Maka dari itu, diperlukan pengawasan terhadap kegiatan perikanan agar terciptanya perikanan yang ramah lingkungan. Semua pihak dari konsumen hingga produsen, memiliki tanggung jawab agar selalu menjaga lingkungan khususnya di sektor perikanan.

Selain produk migas, ekspor-ekspor produk non-migas juga sangat berperan dalam meningkatkan perekonomian Indonesia. Permintaan ekspor dari berbagai negara-negara besar terus meningkat setiap tahunnya. Produk-produk perkebunan maupun perikanan seperti kopi, karet, tuna maupun udang sangat diminati di pasar Internasional. Namun banyaknya persyaratan yang agak rumit, menjadi kendala tersendiri bagi pengeksport produk tersebut ke pasar Internasional.

Khususnya dalam subsektor perikanan udang, proses ekspor produk dari pelaku industri mengalami kendala dalam ekspornya ke negara-negara Uni Eropa. Ketatnya regulasi-regulasi produk ekspor yang diizinkan masuk ke pasar Uni Eropa, ditambah lagi dengan isu lingkungan yang semakin hangat terjadi dikalangan masyarakat Uni Eropa. Disamping itu, permintaan ekspor dari berbagai negara Uni Eropa terhadap produk udang semakin meningkat setiap tahunnya.

Dalam hal ini, Seafood Savers yang merupakan inisiatif dari WWF-Indonesia melakukan kerjasama dengan para pelaku industri perikanan dan juga pemerintah Indonesia untuk memperlancar dan meningkatkan ekspor udang Indonesia ke Uni Eropa. Dengan adanya kerjasama ini diharapkan Seafood Savers dapat menjembatani proses ekspor produk udang Indonesia dengan lancar serta menyediakan wadah agar para pelaku industri dapat memenuhi standarisasi produk yang sudah ditetapkan pasar Uni Eropa.

Dalam upaya untuk memenuhi standarisasi tersebut, Seafood Savers mengacu pada dua sertifikasi ekolabel. MSC (*Marine Stewardship Council*) untuk perikanan tangkap dan ASC (*Aquaculture Stewardship Council*) untuk perikanan budidaya. Dua sertifikat ekolabel ini sudah diakui di pasar internasional sebagai standarisasi sebuah produk perikanan yang layak digunakan. Maka dari itu, Seafood Savers sebagai sebuah NGO melakukan bimbingan ataupun bantuan kepada anggotanya yang ingin mendapatkan kedua sertifikasi tersebut untuk produk-produk perikanan mereka khususnya produk udang.

Dalam upayanya untuk meningkatkan ekspor udang Indonesia ke Uni Eropa, Seafood Savers melakukan berbagai kegiatan bersama para pelaku industri maupun Institusi pemerintahan. Kegiatan tersebut biasanya berbentuk advokasi terhadap pemerintahan yang mana kebijakannya kadang tidak sesuai dengan kriteria perikanan yang berkelanjutan ataupun kebijakan yang mempersulit pelaku industri dalam melakukan kegiatan perikananannya. Seafood Savers juga menjadi wadah atau penghubung antar pelaku industri, institusi pemerintahan dan konsumen. Hal ini dilakukan agar terciptanya ruang diskusi untuk membahas permasalahan dan kendala serta peluang dan tantangan perbaikan perikanan di Indonesia antara pelaku industri perikanan dan pemerintah.

Seafood Savers sebagai NGO juga melakukan asistensi atau pembinaan kepada para pelaku industri perikanan serta mempromosikan produk-produk perikanan mereka yang sudah bersertifikasi ekolabel. Hal ini tentu akan membuat para konsumen khususnya di Uni Eropa tidak meragukan lagi asal usul produk yang mereka gunakan. Dan yang terakhir Seafood Savers sebagai sebuah NGO selalu mengkampanyekan perbaikan lingkungan dan terus meningkatkan kesadaran masyarakat agar selalu menggunakan atau memakai produk yang ramah lingkungan.

Diharapkan dengan adanya upaya-upaya Seafood Savers, tidak hanya pelaku industri yang memberikan perhatian terhadap perikanan Indonesia. Masyarakat sebagai konsumen juga diharapkan bijak dalam memilih produk perikanan serta terus meningkatkan kesadaran

akan pentingnya menjaga lingkungan. Sehingga Indonesia dapat dikenal dengan baik sebagai penghasil produk perikanan yang ramah lingkungan di pasar dunia dan menghilangkan keraguan masyarakat Internasional dalam menggunakan produk dari Indonesia.

REFERENCES

BUKU

Apridar. (2007). *Ekonomi Internasional Sejarah, Teori, Konsep dan Permasalahandalam Aplikasinya*. Jakarta: Unimal Press.

Azizah, N. (2013). *Advokasi Kuota Perempuan di Indonesia*. Yogyakarta: LP3M UMY.

Bakry, U. S. (2016). *Metode Penelitian Hubungan Internasional*. Dalam U. S. Bakry, *Metode Penelitian Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Fauzi, A. (2005). *Kebijakan Kelautan dan Perikanan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Jatmika, S. (2016). *Skripsi Metodologi & Romantikanya*. Yogyakarta: Samudra Biru.

Lubis, E. (2012). *Pelabuhan Perikanan*. Bogor: IPB Press.

Muhammad, A. (2017). *Supranasionalisme Uni Eropa*. Yogyakarta: LP3M

Siombo, M. R. (2010). *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

JURNAL

Dariah, A. R. (2005). *Perdagangan Bebas : Idealisme Dan Realitas* . 115-126.

Hardono, G. S., Rachman, H. P., & Suhartini, S. H. (2004). *Liberalisasi Perdagangan: Sisi Teori, Dampak Empiris Dan Perspektif Ketahanan Pangan* . *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 77.

Richardson, M. (2005). *Australia-Southeast Asia relations and the East Asian Summit*. *Australian Journal of International Affairs* , 351-364.

Teegen, H. (2004). The Importance of Nongovernmental Organization (NGOs) in Global Governance and Value Creation. *An International Business Research Agenda*, 35.

Tujil, P. V. (1999). NGOs and Human right: sources of justice and Democracy. *Journal of International Affairs*, 495.

Widyasanti, A. A. (2010). Perdagangan Bebas Regional Dan Daya Saing Ekspor: Kasus Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, 7-11.

WEBSITE

ASC. (2019). *New Standard and Review*. Retrieved from asc-aqua.org: <https://www.asc-aqua.org/what-we-do/our-standards/new-standards-and-reviews/>

DJPDS. (2018, Oktober 19). Kinerja Ekspor Produk Perikanan Indonesia Tahun 2018 . Retrieved from KKP: <https://kkp.go.id/djpdspkp/artikel/7947-kinerja-ekspor-produk-perikanan-indonesia-tahun-2018>

Ekarina. (2019, Maret 1). *RI Berpeluang Genjot Ekspor Udang ke Tiongkok dan Uni Eropa*. Diambil kembali dari katadata.co.id: <https://katadata.co.id/berita/2019/03/01/ri-berpeluang-genjot-ekspor-udang-ke-tiongkok-dan-uni-eropa>

EUFLEGT. (2019). *EUFLEGT Facility*. Retrieved from euflegt.efi.int: <http://www.euflegt.efi.int/indonesia>

European Commision. (2017, Oktober 17). *Import and Export Rules*. Retrieved from ec.europa.eu: <https://ec.europa.eu/trade/import-and-export-rules/>

Europa Union. (2017, 9 10). *EU-Indonesia relations*. Retrieved from Europa.eu: https://eeas.europa.eu/headquarters/headQuarters-homepage/4009/eu-indonesia-relations_en

Hartomo, G. (2019, Juli 4). *Ekspor Perikanan Indonesia Melonjak 24% di Semester I-2019*. Retrieved from okezone: <https://economy.okezone.com/read/2019/07/04/320/2074689/ekspor-perikanan-indonesia-melonjak-24-di-semester-i-2019>

- Karns, M. (2019, Oktober 11). *Britannica.com*. Dipetik Oktober 16, 2019, dari Nongovernmental Organization: <https://www.britannica.com/topic/nongovernmental-organization>
- Kemendag. (2019, Juli 18). *Persyaratan Mutu Udang Uni Eropa* . Dipetik 10 12, 2019, dari Kemendag: <http://inatrim.kemendag.go.id/index.php?id=persyaratan-mutu-udang-uni-eropa>
- Kontan. (2018, 08 15). *KKP targetkan produksi udang budidaya sebanyak 700.000 ton tahun ini*. Dipetik 10 12, 2019, dari Kontan: <https://industri.kontan.co.id/news/kkp-targetkan-produksi-udang-budidaya-sebanyak-700000-ton-tahun-ini>
- Malena, C. (1995, Maret). *Working with NGO : A Practical Guide to Operational Collaboration*. Dipetik Oktober 16, 2019, dari <http://documents.worldbank.org>: <http://documents.worldbank.org/curated/en/814581468739240860/pdf/multi-page.pdf>
- MSC.(2018, Juli 5). *Developing Our Standard*. Retrieved from [msc.org](http://www.msc.org): <https://www.msc.org/standards-and-certification/developing-our-standards>
- Seafood Savers. (2017, Desember). *Pedoman Institusi Seafood Savers*. Diambil kembali dari Seafood Savers: http://www.seafoodsavers.org/wp-content/uploads/2017/08/ID_Institutional-Guideline_Seafood-Savers_Des-2017.pdf
- Seafood Savers. (2019). *Apa Itu Seafood Savers?* Dipetik 10 12, 2019, dari Seafood Savers: <https://www.seafoodsavers.org/tentang-kami/>
- Seafood Savers. (2016, April 23). *Laporan Keanggotaan UD Pulau Masdalam Seafood Savers*. Retrieved November 19, 2019, from [Seafoodsavers.org](http://www.seafoodsavers.org): https://www.seafoodsavers.org/wp-content/uploads/2016/08/IN_FIP-Report_UD-Pulau-Mas_Ikan-Karang_Tahun-4-Semester-1.pdf
- Setnas-asean. (2017). *ASEAN Free Trade Area Council*. Retrieved from setnas-asean.id: <http://setnas-asean.id/asean-free-trade-area-afta-council>